



## KOMUNIKASI LINGKUNGAN PADA PENGOLAHAN SAMPAH DAUR ULANG DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SUMUR BATU BEKASI

HAMLUDDIN

hamluddin@ibm.ac.id

Ilmu Komunikasi, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

### ABSTRACT

*Environmental communication on the problem of recycled waste processing in the Sumurbatu Final Disposal Site (TPA) is an important discourse in formulating solutions to environmental problems that occur. The research location was determined in the Sumurbatu TPA area for several reasons, among others, the location was the center for final waste disposal for all residents of the capital city of Jakarta and Bekasi City with a population of around 13 million. The volume of waste disposal, which reaches 9,000 tons per day from DKI, and 900 tons per day from Bekasi City residents, has caused environmental pollution that has been going on for a long time. Pollution occurs to the air, soil and water contained therein. The open dumping system has become a major factor in pollution, and new appropriate technology has been pursued by the Central and Regional Governments in recent years. Due to the inadequacy of the waste processing system, especially in the Sumur Batu TPA, the Ministry of Environment has crossed out the name of Bekasi City in the list of Adipura cities because the value obtained is certain to be low because the final waste handling is not good. Due to this problem, the waste recycling program is implemented by optimizing the role of communicators to encourage changes in the waste processing system approach. Through this program, it is hoped that waste will have been sorted from the source to reduce the volume that goes to final disposal. Using a qualitative approach, the researcher wants to know the implementation of environmental communication in the implementation of the program by focusing on convergence communication, namely the creation of an understanding between all stakeholders in the recycled waste management system.*

*Key words: Environmental communication, waste management, recycling.*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Tempat Pembuangan Sampah (TPA) merupakan penyumbang emisi rumah kaca terbesar dari kandungan yang dihasilkan berupa CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> dan NH<sub>4</sub> atau gas metana yang dilepaskan ke udara.



Terdapat tiga kawasan pembuangan sampah akhir di wilayah Bekasi, yaitu TPA Sumur Batu milik pemerintah Kota Bekasi seluas 13 hektar, TPST Bantargebang yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 113,15 hektar, dan TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi seluas 13 hektar. Lokasi ketiga kawasan sampah ini berdampingan, sehingga membentuk kawasan sampah dalam area luas.

Volume buang sampah ketiga wilayah tersebut sangat banyak jumlahnya. Pemerintah DKI membuang sampah warganya sekitar 8.000-9.000 ton per hari, sampah Kota Bekasi sekitar 900 ton per hari, hampir sama jumlahnya dengan sampah warga Kabupaten Bekasi. Zona sampah yang membentuk jejeran bukit setinggi 24 meter dikelola sesuai dengan kemampuan masing masing pemerintah daerah.

Pengelolaan sampah TPST Bantargebang yang beroperasi sejak tahun 1989, beberapa kali mengalami inovasi dalam bidang teknologi pengolahan sampah. Saat ini, DKI menjalankan project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan kapasitas 100 ton per hari atau menghasilkan listrik sekitar 700 kW per jam dari sistem oleh gas metan. Adapun pengelolaan di TPA Sumur Batu, telah menggandeng sejumlah perusahaan untuk merealisasikan program listrik sampah, di antaranya PT. Mamminasata Dalle Konstruksi, PT Matahari Hijau Energi, dan PT Bio Electra Power Indonesia, sejak 2019 lalu. Namun hasil listrik yang diperuntukkan bagi warga sekitar belum terealisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di tiga lokasi tersebut adalah dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) dengan melakukan *cover soil* atau penutupan menggunakan tanah pada setiap ketinggian tertentu untuk mengurangi sebaran gas metana dan pencemaran lebih luas. Pemerintah maupun masyarakat dalam mengolah sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Padahal timbunan sampah dengan volume besar di lokasi tempat pemrosesan akhir berpotensi melepaskan gas metana ke udara. Semua jenis sampah masuk ke tiga kawasan sampah tersebut tanpa adanya proses pemilahan terlebih dahulu untuk sampah organik dengan sampah non organik. Komposisi dan karakteristik sampah di masing-masing lokasi adalah 43% organik dan 35% sampah plastik dan PET (*Poly Ethylene Terephthalate*) atau plastik yang bisa daur ulang. Sistem pembuatan terbuka ini beresiko tinggi dalam pencemaran udara, tanah dan air.

Undang undang Nomor 18 tahun 2008 Pasal 22 tentang Pengelolaan Sampah mutlak dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Regulasi penanganan sampah spesifik seperti plastik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012, yang membahas perlunya perubahan pada sistem pengolahan limbah yang mendasarinya, mulai dari proses pengumpulan-pengangkutan-pembuangan hingga pengolahan limbah sisa dan metode penanganan.



Penelitian ini berfokus pada sistem pengolahan sampah daur ulang terutama jenis plastic atau PET di kawasan TPA Sumurbatu dalam perspektif komunikasi lingkungan. Dalam perspektif ini, seluruh pemangku kepentingan dalam berinteraksi lalu bersama sama mendorong perubahan di masyarakat, yang meliputi: 1) peran pemerintah; 2) pemangku kepentingan pendukung seperti pelapak; 3) dan pemulung dengan model komunikasi konvergensi di antara pemangku kepentingan tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini merupakan pertanyaan yang mengedepankan kualitas dari permasalahan yang ingin dibahas:

Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam aktivitas komunikasi lingkungan pada pengolahan sampah daur ulang di TPA Sumur Batu, Kota Bekasi?

### **Tujuan Penelitian**

Mengetahui peran pemangku kepentingan dalam mendorong kesehatan masyarakat dan lingkungan dalam pengolahan sampah daur ulang di TPA Sumur Batu, Kota Bekasi.

### **Lokasi Penelitian**

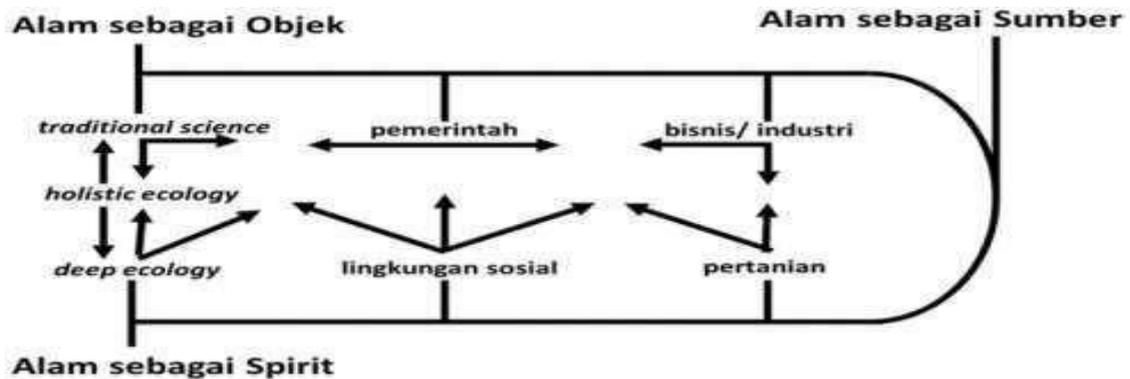
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di lingkungan masyarakat pemulung sampah daur ulang di kawasan TPA Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

### **Tanggal Penelitian**

Pelaksanaan penelitian berlangsung 1,5 bulan, dimulai tanggal 15 Februari- 31 Maret 2021.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada abad ke-20 yang dikenal sebagai era “revolusi lingkungan” perspektif manusia terhadap lingkungan. Killingsworth & Palmer (2012) memberikan jalan keluar pada penelitian semacam ini dengan membuat konfigurasi yang memotret semua pemangku kepentingan dalam sistem interaksi yang saling terhubung (lihat gambar di bawah). Gambar tersebut disebut sebagai pandangan tapal kuda karena bentuknya menyerupai tapal kuda.



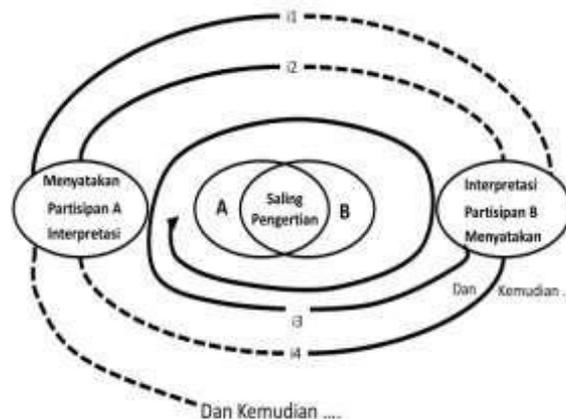
Sumber: Killingsworth & Palmer  
(2012)

Tapal kuda dimaknai terjadinya pertemuan antara kelompok, kemudian terjadi hubungan kerjasama namun sisi lain juga terdapat potensi konflik akibat perbedaan kepentingan. Model tapal kuda ini dipandang sebagai formulasi yang baik dalam komunikasi lingkungan. Seperti ditunjukkan pada gambar, adanya interaksi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah dengan industri, atau lingkungan sosial dengan pertanian yang terlibat dalam kesepahaman cara pandang pada lingkungan berdasarkan perspektif tradisional sains, ekologi menyeluruh, dan ekologi mendalam. Hal ini disebut sebagai upaya menyelaraskan diri dengan alam sekitar. (Naess, 1973).

### Model Komunikasi Konvergensi

Menerangkan bahwa kegiatan komunikasi diawali “dan...kemudian...” dengan tujuan mengingatkan bahwa ada peristiwa yang terjadi sebelum komunikasi dimulai. Si A bisa saja tidak mengetahui suatu peristiwa sebelum berbagi informasi dengan (i.1) si B. Si B kemudian melakukan pengkodean terhadap informasi yang diterima, sampai ia menanggapi dan memberikan informasi balik (i.2) kepada A.

Kemudian A menerima dan menyimpan informasi yang dia terima (i.3) pada topik yang sama. Si B memaknai pesan, lalu melanjutkan komunikasi dengan topik yang telah mengalami penyamaan persepsi tersebut (i.4 ...n) sampai keduanya mencapai kata sepakat atas pembicaraan terjadi. Dengan begitu, tidak ada panah yang mengarah “ke...dan dari...” pada setiap informasi.



Sumber: Kincaid (1979); Flor & Cangara (2018)

Maka dengan penjelasan ini, komunikasi tidak dapat diposisikan hanya sebagai pendukung tetap harus menjadikan komunikasi sebagai unsur terpenting dalam usaha pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Kedudukan komunikasi dalam hal ini adalah menjadi penentu persoalan sosial yang berkembang, bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan termasuk aspek sosial-budaya.

Perlu untuk dipahami bahwa komunikasi konvergensi tidak harus menjadi orientasi utama, tetapi kedudukannya mampu mendorong munculnya partisipasi semua pihak. Karena agenda utama dari komunikasi lingkungan adalah pemberdayaan masyarakat agar tidak bersifat pasif, dan menjadi sumber informasi aktif (Flor & Cangara, 2018).

Dalam penelitian ini, komunikasi konvergensi mendudukan permasalahan dengan pandangan yang luas terhadap keadaan lingkungan. Intinya ada pada bagian komunikasi yang berputar dan cenderung dipertukarkan di mana peran komunikator dimiliki semua orang yang terlibat, hanya posisinya terjadi secara bergantian. Dengan kata lain, semua pemangku kepentingan berada dalam satu rantai yang melingkar dengan fungsi masing-masing, kemudian saling bekerjasama secara berkelanjutan seperti digambarkan dalam bentuk roda.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data secara kualitatif pada penelitian ini dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: 1) Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan terhadap partisipan dan selain partisipan; 2) Wawancara secara terbuka kepada partisipan; 3) Dokumen yang bersifat umum; dan 4) Dokumen foto, video dan rekaman suara dari kegiatan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah: 1) Yayan Yuliana (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi); Bagong Suyoto (Tokoh masyarakat Kelurahan Sumur Batu); Ibu Kemas Komalasari (Kepala Yayasan TK Pelangi Semesta Alam untuk anak-anak pemulung); Ibu Suami (pemulung sampah daur ulang); Pak Komar (pemulung sampah daur ulang); Pak Sali (pemulung sampah daur ulang); Pak Robert dan Pak Ipul (pemulung sampah daur ulang) di kawasan TPA Sumur Batu; 2) Fakta lain dalam bentuk dokumen atau arsip; 3) Hasil dari wawancara dan catatan lapangan lainnya yang terkait dengan penelitian.



Selanjutnya, data data dari informan dianalisis dengan cara mengkonstruksi fenomena sesuai dengan penjelasan setiap informan (Wimmer dan Dominick, 2011). Hasil tersebut kemudian disusun secara urut dan sistematis, kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan untuk mendapatkan pernyataan sampai pada tahap kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Komunikasi lingkungan adalah ilmu yang mengkaji hubungan manusia dengan lingkungannya. Implementasi komunikasi lingkungan dapat diidentifikasi sebagai tindakan simbolik berdasarkan peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Komunikasi lingkungan mendorong terciptanya kepercayaan, sikap, hingga pengambilan keputusan. Hal ini didapat dari proses percakapan, diskusi, yang melibatkan berbagai pihak dalam permasalahan pengelolaan sampah.

Konstruksi program daur ulang sampah ini didasari pada beberapa regulasi, di antaranya Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R). Kemudian diatur juga dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 09 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengolahan Sampah.

Secara spesifik, penelitian ini mengidentifikasi komunikasi lingkungan dalam program daur ulang sampah yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, pemulung sampah daur ulang, serta tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan.

Penelitian Komunikasi lingkungan memiliki karakteristik khusus karena masalah lingkungan hidup bersifat sistematis. Untuk itu, penelitian ingin melihat interaksi dan pola hubungan antar pemangku kepentingan dalam hubungan saling ketergantungan (*interdependensi*). Seperti halnya model yang diperkenalkan Killingsworth dan Palmer (2012) yang menjadikan alam sebagai objek (A), alam sebagai sumber (B), dan alam sebagai spirit (C).

Selain kerjasama, akan terjadi ketegangan karena perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program daur ulang sampah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Bekasi, pengepul dan pemulung sampah di lokasi TPA Sumur Batu, serta LSM dan tokoh masyarakat. Komunikasi konvergensi akan selalu menganjurkan kepada para pihak kepentingan agar mengutamakan saling pengertian (*mutual understanding*), guna mencegah masalah yang timbul seperti pencemaran lingkungan sekitar.



**Tabel 1**  
**Komponen-komponen Komunikasi Lingkungan Pengolahan Sampah Daur Ulang**

Komponen Komunikasi	Keterangan dan Implementasi
<i>Source</i> : Pengirim/ pembuat pesan. <i>Encoding</i> : Proses pembentukan pesan (simbol). <i>Message</i> : Berupa isi informasi, bentuk simbol, pesan yang bersifat verbal/ non verbal, atau berupa sesuatu yang disampaikan/dikirim/ditujukan. <i>Channel</i> : Saluran yang digunakan. <i>Decoding</i> : Menerjemahkan pesan, interpretasi, mengartikan, memaknai, memahami, memecahkan, membuka, dll. <i>Receiver</i> : Penerima pesan (simbol). <i>Context</i> : Dimaknai sebagai situasi, kondisi, atau lingkungan. <i>Noise</i> : Gangguan dan hambatan. <i>Feedback</i> : Umpan balik atau reaksi penerima pesan.	Dilaksanakan oleh Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, tokoh masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, pengepul, pemulung, akademisi, masyarakat. Isu pengelolaan sampah daur ulang sebagai rekayasa sosial. Bentuk pesan komunikasi: Mengolah sampah produktif bernilai ekonomis. Media massa, media sosial, antarpribadi, kelompok.  Solusi terhadap masalah lingkungan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat: peran sosial-politik, lingkungan, personal-spiritual, ekonomi, budaya. Masyarakat di sekitar TPA Sumur Batu, swasta, akademik. Program daur ulang masih berorientasi ekonomi saja dan cenderung mengabaikan kelestarian lingkungan, respons masyarakat berbeda beda. Berbeda kepentingan dalam sistem olah sampah, kurangnya SDM sebagai penggerak, dan stigma negatif masyarakat. Laporan kegiatan pengolahan daur ulang sampah kepada aparaturnya lingkungan RT/RW

Sumber: Olah data penelitian (2021)

Program daur ulang sampah adalah wujud komunikasi strategis yang bertujuan menyukseskan pembangunan di bidang lingkungan. Program ini diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, dengan rangkaian kegiatan sosialisasi, pendampingan, hingga pelaksanaan program jangka panjang yang mengakomodasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana, mengatakan bahwa program daur ulang sampah telah diatur pelaksanaannya dalam Perda Kota Bekasi Nomor 09 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.



Implementasi dari kegiatan komunikasi lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah, sosialisasi pelaksanaan pengolahan sampah kepada warga yang difokuskan pada tingkat rumah tangga atau sumber sampah, kemudian mendorong pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R yang bersifat sementara di lingkungan pemukiman warga, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengolahan sampah daur ulang.

Pelaksanaan melibatkan sejumlah aparatur daerah, di antaranya, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, petugas kecamatan, serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku aparatur untuk ketertiban terhadap Perda yang disahkan. Tahapan sosialisasi dari petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup, lalu petugas lapangan menyampaikan kepada aparatur yang terlibat hingga ke tingkat RT dan RW, yang kemudian menyampaikan kepada tokoh masyarakat, dan kepada pemulung serta pengepul.

Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan kesamaan persepsi, pandangan, keputusan dan tindakan di antara pemangku kepentingan. Hadirnya tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai *opinion leaders*, didorong untuk membangun kepercayaan dan mereduksi kecurigaan terhadap program yang bersifat dari atas ke bawah (*top down*). Pesan maupun simbol simbol yang dikomunikasikan disampaikan melalui surat edaran yang bersifat resmi kelembagaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, melakukan pertemuan formal dan informal di Kantor Kelurahan Sumur Batu atau di lingkungan pemulung di kawasan TPA Sumur Batu.

Menurut Yayan, di dalam menjalankan kegiatan sosialisasi petugas menyampaikan regulasi daur ulang yang berorientasi pada tiga aspek, yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi, relasi sosial yang baik, dan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut memiliki konsekuensi terhadap hukum yang berlaku sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah. “Kami melakukan sosialisasi secara rutin dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah,”.

<b>Program</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Upaya yang sudah dilaksanakan</b>
Pengolahan sampah daur ulang	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta; Adanya penolakan TPS 3R dibangun di lingkungan warga; Armada angkut sampah minim dengan jumlah laik jalan 500 armada, dari total kebutuhan 900 armada angkut; Penegakan hukum tindak pidana ringan terhadap pelaku pencemaran lingkungan belum	Pelibatan masyarakat dalam program pengolahan sampah; Meyakinkan masyarakat terkait pentingnya TPS 3R; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di 12 kecamatan sebagai penunjang program; Mengaktifkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk pelaku pencemaran sampah.
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terjadi pencemaran air sungai dan air tanah; Kesadaran pelaku usaha daur ulang dalam melaksanakan regulasi dan tertib	Membina serta melakukan pengawasan berkala kepada para pelaku usaha berpotensi menimbulkan lingkungan; Melaksanakan kegiatan monitoring dan



	masih rendah; Minim TPS limbah B3.	terhadap kegiatan yang telah mendapat izin lingkungan; Menjalin kerjasama dalam rangka penegakan aturan bersama PPLH Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Tidak ada data pasti terkait besaran emisi rumah kaca yang ditimbulkan oleh sampah di lokasi pembuangan	Bekerjasama dengan lembaga vertikal, PPLH dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memenuhi kebutuhan data tersebut.
Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Banyaknya pelanggaran terhadap pengendalian pencemaran lingkungan yang diadakan oleh masyarakat.	Menjalin kerjasama dengan aparat hukum untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang bersifat pidana.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	Masih rendahnya kepedulian atau minat suatu institusi atau kelompok masyarakat terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan.	Melakukan pembinaan dan terhadap lembaga masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup & data lapangan.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari lima program utama dalam hal pengendalian pencemaran lingkungan memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan berbeda pada setiap masalah yang ada, agar usaha pengendalian berjalan efektif. Secara umum, permasalahan atas usaha pengendalian dampak pencemaran lingkungan bisa dibagi ke dalam 3 hal, yaitu: kesadaran yang rendah; minimnya akses terhadap informasi terkait kondisi terkini pencemaran yang disajikan dalam bentuk data riil; serta komitmen penegakan hukum.

Ketiga hal tersebut dapat berjalan efektif manakala seluruh pemangku kepentingan memiliki kesamaan pandangan, kesamaan komitmen, dan bekerja secara bersama sama dalam pengendalian dampak pencemaran lingkungan. Komunikasi konvergensi melingkup seluruh aspek tersebut, di mana terjadi kesepahaman terhadap satu program yang dikomunikasikan para pemangku kepentingan.

Ketua LSM Koalisi Persampahan Nasional Bagong Suyoto, mengatakan program daur ulang sampah tidak terorganisir sehingga misi pemerintah daerah dalam program jangka panjang menyehatkan lingkungan di sekitar TPA Sumur Batu, tidak berjalan optimal. "Selain sosialisasi yang kurang, pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam program ini,".

Menurut Bagong yang berdomisili dan membangun sekolah untuk anak pemulung di lokasi TPA Sumur Batu, program sosialisasi daur ulang sampah lebih mengandalkan peran RT/RW yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tetapi peran tersebut tidak optimal, karena tidak dilakukan pendampingan secara optimal dan berkelanjutan pada aspek pengembangan pengembangan pengetahuan daur ulang sampah.



Kondisi riil yang terjadi di TPA Sumur Batu adalah, pengusaha yang berasal dari luar kota seperti asal Madura, merupakan *leaders* dalam kegiatan daur ulang sampah terutama jenis plastik atau PET. Dalam memperlakukan lingkungannya, mereka cenderung menempatkan alam sebagai objek dan sebagai sumber dalam perspektif bisnis atau industri. Mereka dikenal dengan sebutan pengepul yang memiliki modal ekonomi kuat, sementara warga lokal menjadi pemulung sampah daur ulang dan dijual kepada pengepul.

Interaksi dengan pemerintah daerah tidak berlangsung baik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya, lingkungan hanya diposisikan sumber ekonomi bukan alam yang harus dilestarikan untuk kepentingan jangka panjang. Faktor lain adalah, resistensi terhadap pemerintah yang telah menjadi keyakinan bersama bahwa ketika berhubungan dengan pemerintah berarti menyerahkan biaya administrasi, upah, dan sejenisnya.

Dengan tidak memosisikan lingkungan sebagai spirit, maka komunikasi antara pemerintah, industri dan lingkungan sosial tidak pincang. Usaha penyehatan lingkungan sebagai program jangka panjang tidak akan berjalan optimal. Keadaan inilah yang masih menjadi penghambat dari program pengendalian dampak lingkungan dari sampah daur ulang.

Salah seorang pemulung, Pak Salih menyampaikan bahwa sampah daur ulang dikerjakan secara mandiri oleh setiap pemulung yang bekerja secara berkelompok kelompok. Untuk sampah plastik atau PET, mereka kumpulkan lalu dicuci dengan air hingga bersih dari sampah lain yang menempel, dijemur sebelum diantar ke pengepul. Komunikasi dengan pemerintah hanya diwakili oleh RT atau RW. "Itupun jarang."

Materi sosialisasi yang mereka dapatkan seputar keadaan yang terjadi di lingkungan, seperti menjaga keamanan lingkungan, membayar kewajiban sewa lahan, pembelian air bersih, dan hal yang lain terkait bisnis. Pada dasarnya, kehadiran pemulung di kawasan TPA Sumurbatu membantu pemerintah dalam mereduksi volume sampah di TPA meski persentasenya kecil. Karena dengan mereka memulung sampah plastik atau jenis PET, maka jumlah sampah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan bisa berkurang.

Penguatan materi terkait pemeliharaan lingkungan pada pemulung dan swasta atau pengepul di TPA Sumurbatu harusnya dilakukan secara intensif dan bersifat persuasif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap program pemerintah. Selain itu, agenda edukasi dan mendorong pelaksanaan program olah sampah secara 3R berjalan baik, terukur capaiannya, dan melibatkan seluruh unsur.

Menurut Pak Salih, aspek ekonomi dan bisnis sangat dominan dalam sistem olah sampah daur ulang di mana setiap orang atau kelompok berusaha mengambil keuntungan sebanyak banyaknya. Seorang pemulung, hanya memiliki penghasilan sekitar Rp 1,5 juta per bulan, sementara pengepul beberapa kali lipat memperoleh keuntungan dari pemulung.



Keuntungan tersebut diperoleh dari, antara lain, volume penjualan lebih banyak karena pengepul membawahi beberapa kelompok pemulung; pengepul bisa memainkan timbangan dengan mendapatkan keuntungan dari selisih timbangan basah dan timbangan kering; serta keuntungan dari mengingat pemulung untuk terus bekerja padanya dengan memberikan pinjaman uang untuk menopang kebutuhan pokok setiap bulannya. Kondisi inilah yang menyebabkan usaha penyehatan lingkungan dan pengendalian pencemaran tidak berjalan dengan baik. Karena interaksi di antara para pemangku kepentingan tidak berjalan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Komunikasi lingkungan pada pengolahan sampah daur ulang merupakan program yang membutuhkan pendekatan dan strategi khusus. Perbedaan karakteristik, cara pandang, dan kepentingan di antara para pemangku kepentingan menyebabkan komunikasi tidak berjalan optimal. Komunikasi berlangsung dalam skala formal, tetapi belum sampai pada tahap ketaatan setelah menerima informasi terkait sistem olah sampah yang sesuai dengan regulasi. Program pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sudah ada, tetapi tidak sampai dipahami oleh masyarakat di tingkat bawah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: 1) Sosialisasi penyehatan lingkungan dalam pengolahan sampah daur ulang oleh petugas lapangan belum optimal sehingga tidak sampai menjadi tujuan utama oleh pemulung atau pengepul; 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi belum berjalan; 3) keterlibatan aktor pesan (opinion leader) masih rendah sehingga proses daur ulang sampah hanya berorientasi keuntungan bukan lingkungan; dan 4) kegiatan pengolahan sampah daur ulang dilakukan secara mandiri atau kelompok kelompok masyarakat tanpa pembinaan pemerintah.

Dengan kondisi demikian, maka peneliti menyarankan agar program daur ulang sampah dalam rangka pembangunan lingkungan yang sehat harus disandarkan pada terciptanya kesepahaman antar pemangku kepentingan. Interaksi antar seluruh pemangku kepentingan harus dijadwalkan secara rutin, baik formal maupun informal untuk menimbulkan kesamaan rasa, kesamaan pandangan, dan kesamaan misi atau tujuan yang terukur dan dapat dicapai.



### DAFTAR PUSTAKA

- Flor, A.G. & Cangara, H. 2018. *Komunikasi Lingkungan: Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Melalui Strategi Komunikasi. Edition perdana*. Jakarta (ID), Prenada Media Grup.
- Killingsworth, MJ. & Palmer, J.S. 2012. *Ecospeak: Rhetoric and Environmental Politics in America*. 1<sup>st</sup> edition. Carbondale & Edwardsville (US), Southern Illinois University Press.
- Kincaid, D.L. 1979. *The Convergence Model of Communication*. In: *Papers of The East-West Communication Institute*. Honolulu, East-West Communication Institute.p.
- Naes, A. 1973. *The Shallow and The Deep, Longrange Ecology Movement. A Summary. Inquiry*. (Online) 16 (1-4), 95-100. Available from:  
doi:10.1080/00201747308601682.
- Shahreza, Mirza. Saraswati, dkk. 2020. *Komunikasi lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang*, Jurnal Penelitian Komunikasi.
- Wimmer, R.D. & Dominick, J.R. 2011. *Mass Media Research: An Introduction*. 9<sup>th</sup> edition. Boston, Wadsworth, Cengage Learning.
- Yuliana, Yayan. 2021. *LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Indikator Kinerja Utama*. Pemerintah Kota Bekasi.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.